S
336.207
Sya
d
2011

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh :

SYAIFUL WATON

NIM. 01061002067

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Untuk Memenuhi sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : SYAIFUL WATON
NIM : 01061002067
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 29 Juli 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 29 Juli 2011

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D	Drs.Bambang Bemby M.A,Ph.D	Drs. M.Hibzon, M.Si
NIP 195212121981021001	NIP 195306161198011 1004	NIP195712141987031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Waton

NIM : 01061002067

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

'' Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang".

Pembimbing:

Ketua : Prof. H. Syamsurijal. AK, Ph.D

Anggota : Drs. Bambang Bemby Subyakto, M.A, Ph.D

Tanggal diuji : 29 Juli 2011

Adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 4 Agustus 2011

Yang memberi pernyataan,

Hormat saya,

METERAI TEMPEL

E34B7AAF497700394

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Syaiful Waton

NIM. 01061002067

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa:

Nama : Syaiful Waton

NIM : 01061002067

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan grammer, maupun susunan tensesnya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, Agustus 2011

Pembimbing Skripsi

Ketua,	Anggota,
Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D	Drs. Bambang B. Subyakto, M.A, Ph.D
NIP. 195212121981021001	NIP. 19530616198011004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*
  (Qs. Al Insyirah: 6-8)

- *Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang bila dimanfaatkan, sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan. (Ali bin Abi Thalib)*

- *Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri dan bersikaplah rendah hati kepada orang-orang yang mengajarmu (HR. Athabrani)*

Skripsi ini

Kupersembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku yang tercinta*
- *Alammaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini mengambil judul **"Analsisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang"** sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*) atau rentang waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2006-2010 yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga atau badan tertentu seperti Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Kota Palembang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan dan pengukuran efektifitas Pajak Penerangan Jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2006-2010 terdapat selisih yang sangat besar antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang, ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang belum tercapai secara optimal, sementara untuk efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut belum efektif.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sebaiknya melaksanakan survei dan pendataan potensi Pajak Penerangan Jalan secara berkala dan terus menerus dengan memiliki data-data yang lengkap mengenai biaya beban dan biaya pemakaian listrik per golongan tarif pelanggan. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Kota Palembang dalam penetapan target penerimaan Pajak Penerangan jalan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penetapan target.

Banyak sekali hambatan yang dihadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, tetapi berkat kuasa-Nya dan bantuan baik moral maupun materi dari pihak-pihak yang mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Masih banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga nantinya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal A.K, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Dr. Azwardi, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Drs. Nazeli Adnan, M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Drs.Fachrizal Bachri, M.Sc, Pembimbing Akademik.
6. Prof. H. Syamsurijal A.K, Ph.D, Pembimbing I Skripsi.
7. Drs. Bambang Bemby Subiakto M.A, Ph.D, Pembimbing II Skripsi.
8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril, material maupun immaterial.
10. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Teman-teman sejawat seangkatan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman angkatan 2006 di Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya Fery, Helbi, Hendi, Roby, Abu, Vardha, Rangga, Yona, Riri, Chicitri, Sherly Terima kasih atas kebaikannya selama ini.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis

Syaiful Waton

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....iii
PERNYATAAN ABSTRAK.....iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR. vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL. xi
DAFTAR GAMBAR.....xiv
DAFTAR GRAFIK.....xv
DAFTAR LAMPIRAN.....xvi
ABSTRAKSI xvii
ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Perumusan Masalah..... 13
1.3. Tujuan Penelitian..... 13
1.4. Manfaat Penelitian..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori.....15
2.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian.....15
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah.....19
2.1.3. Peranan Pendapatan Asli Daerah.....22
2.2. Pajak.....22
2.2.1. Pengertian Pajak.....22
2.2.2. Aspek Ekonomi dari Perpajakkan.....24
2.2.3. Fungsi Pajak.....24
2.2.4. Teori Pemungutan Pajak.....25
2.2.5. Syarat Pemungutan Pajak.....26
2.2.6. Azaz Pemungutan Pajak.....27

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 112229
TANGGAL : 30 SEP 2011

2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak.....28
2.3. Pajak Daerah.....29
2.3.1. Ciri-Ciri Pajak Daerah.....30
2.3.2. Pajak Penerangan Jalan.....31
2.3.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....31
2.4. Penelitian Terdahulu.....32
2.5. Kerangka Konseptual Pemikiran.....34

BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 36
3.2. Data dan Sumber Data.....36
3.3. Metode Pengumpulan Data.....36
3.3.1. Dokumentasi.....36
3.4. Metode Analisis Data.....37
3.4.1. Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan.....37
3.4.2. Pengukuran Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....38
3.5. Batasan Operasional Variabel.....39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian.....40
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palembang.....40
4.1.2. Kependudukan.....41
4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian.....44
4.1.3.1. Pajak Penerangan Jalan.....44
4.1.3.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang.....45
4.2. Pembahasan.....49
4.2.1. Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan.....49
4.2.2. Perhitungan Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....55
4.2.3. Interpretasi Hasil.....57
4.2.3.1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....57
4.2.3.2. Efektifitas Pajak Penerangan Jalan.....60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....62

5.2. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010.....5

Tabel 1.2. Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010..... 7

Tabel 1.3. Kontribusi 7 Jenis Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode Tahun 2006-2010..... 9

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010..... 11

Tabel 4.1. Banyaknya Kelurahan/Desa per Kecamatan Di Kota Palembang Tahun 2003.....41

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Palembang dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000-2010.....43

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Periode Tahun 2006 -2010.....45

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010..... 46

Tabel 4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang Periode Tahun 2000-2010.....47

Tabel 4.6 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga Periode Tahun 2006-2010.....50

Tabel 4.7 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Pelayanan Sosial Periode Tahun 2006-2010.....51

Tabel 4.8 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis Periode Tahun 2006-2010.....51

Tabel 4.9 Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri Periode Tahun 2006-2010.....51

Tabel 4.10 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga Periode Tahun 2006-2010.....52

Tabel 4.11 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Pelayanan Sosial Periode Tahun 2006-2010.....53

Tabel 4.12 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis Periode Tahun 2006-2010.....53

Tabel 4.13 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri Periode Tahun 2006-2010.....53

Tabel 4.14 Perhitungan Keseluruhan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010.....54

Tabel 4.15 Perhitungan Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010.....56

Tabel 4.16 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Menurut Golongan Tarif Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010 57

Tabel 4.17 Perbandingan Antara Target, Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010 59

Tabel 4.18 Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran..... 34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 69

Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan dan efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang dalam periode selama lima tahun dari tahun 2006-2010.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*) atau rentang waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2006-2010 yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga atau badan tertentu seperti Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan dan pengukuran efektifitas Pajak Penerangan Jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2006-2010 terdapat selisih yang sangat besar antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang, ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang belum tercapai secara optimal, sementara untuk efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut belum efektif.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sebaiknya melaksanakan survei dan pendataan potensi Pajak Penerangan Jalan secara berkala dan terus menerus dengan memiliki data-data yang lengkap mengenai biaya beban dan biaya pemakaian listrik per golongan tarif pelanggan. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Kota Palembang dalam penetapan target penerimaan Pajak Penerangan jalan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penetapan target.

Kata Kunci : Potensi Pajak Penerangan Jalan, efektifitas Pajak Penerangan Jalan

An Analysis of the Potential for Revenues of Traffic Light Taxes in Palembang City

Abstract

This research was intended to analyze the potential for revenues of traffic light taxes and the effectives of such taxes in the five year period of 2006 – 2011.

The secondary data included those collected from publications by city agencies such as Office of Tax Revenues of Palembang City, PT PLN Persero W.S2JB of Palembang Branch in the time series mentioned. The methode applied was a calculated and estimated potential for the revenues of traffic light taxes.

The research results show that there was a big discrepancy between the potential and the revenues realized. In other words, the revenues of traffic light taxes were not maximized. In addition, collection and management of these taxes were less effective.

To increase the revenues, the Office is recommended to undertake a survey and collect data on the potential for the revenues. The Office should have current on electrical bills of big payers and certain customers, and work closely PT PLN Persero W.2SJB of Palembang Branch. This strategy prevents from creating wrong estimates for the collected taxes.

Key words: potential, traffic light, tax, effectiveness

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA BAHASA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam pembiayaan berasal dari pendapatan daerah yang berkesinambungan sangat diperlukan, selain dana alokasi dari pusat. Pemerintah daerah dituntut lebih berperan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat menggali potensi sumber daya yang ada di daerah, terutama sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar bagi daerah guna memperkecil ketergantungan dana pada Pemerintah Pusat. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah dan proses desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelengarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Penyelenggara pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang dimiliki pemerintahaan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam Undang-undang tersebut kewenangan daerah terbagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi (pasal 13 UU N0 32 Tahun 2004) dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian, prinsip yang digunakan adalah *money follows functions*, artinya bahwa besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah tercermin dalam aspek perencanaan (*Planning*) dan penganggaran (*Budgeting*) untuk semua aktivitas di setiap level pemerintahan sesuai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam hal perpajakan daerah, ini sesuai dengan asas desentralisasi yang menyarankan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada pemerintah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup, mengingat kebutuhan negara sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas nasional, maka sumber-sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah sifatnya terbatas. Setiap daerah wajib menggali segala potensi sumber keuangan yang sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah Daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakkan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan Negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Setiap daerah

diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang ada, salah satunya dari sektor pajak daerah. Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 5 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri atas:
   a. Dana Bagi Hasil
   b. Dana Alokasi Umum
   c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan di daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk menyelenggarakan dan membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suparmoko 2003:23).

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada lapangan yang belum digunakan oleh Negara (Pusat). Sebaliknya Negara tidak boleh memungut pajak yang

telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak yang lebih rendah dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatnya.

Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan Pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD (Persen)
2006	45.057.348.825,80	97.202.850.978,37	46,35
2007	51.486.867.607,06	142.128.319.304,47	36,22
2008	69.367.592.779,00	171.383.551.551,77	40,47
2009	84.696.563.176,60	170.540.649.161,73	49,66
2010	104.047.313.437,00	255.193.654.243,66	40,77
JUMLAH	**354.655.685.825,46**	**665.236.857.240,00**	**42,69**

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah selama kurun waktu lima tahun dari periode tahun 2006-2010 mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali, tahun 2009 PAD Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu lima tahun adalah sebesar 42,69 persen, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan jalan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kota Palembang yang berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang adalah Pajak Penerangan Jalan, pemungutan serta pelaporan pendapatan dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota (DISPENDA) Kota Palembang. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dikenakan terhadap pelanggan listrik. Objek Pajak ini diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Palembang untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Tabel 1.2
Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Di Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010
(Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Hotel	4.535.807.247,00	4.954.301.974,00	6.826.069.168,00	10.353.748.458,60	14.094.700.545,00
Pajak Restoran	8.693.872.955,80	10.762.760.474,00	14.044.103.898,00	16.095.416.841,00	19.226.002.354,00
Pajak Hiburan	1.793.524.705,00	2.624.997.097,00	3.748.434.290,00	4.366.158.504,00	5.113.107.739,00
Pajak Reklame	3.628.407.134,00	4.121.043.626.,73	4.138.404.435,00	4.225.282.834,00	4.603.540.213,00
Pajak Penerangan Jalan	24.844.879.752,00	26.896.727.353,33	37.972.161.830,00	47.226.315.254,00	58.305.666.496,00
Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C	507.830.032,00	732.704.132,00	923.565.060,00	540.113.195,00	600.411.497,00
Pajak Parkir	1.053.027.000,00	1.394.332.950,00	1.714.854.098,00	1.889.528.090,00	2.373.884.593,00
Jumlah	**45.057.348.825,80**	**51.486.867.607,06**	**69.367.592.779,00**	**84.696.563.176,60**	**104.047.313.437,00**

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 terlihat bahwa ada tiga macam jenis pajak yang memiliki realisasi penerimaan yang terbesar yaitu, Pajak Penerangan Jalan, pajak restoran dan pajak hotel. Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Palembang yang tertinggi adalah pajak penerangan jalan, dengan total realisasi penerimaan selama lima tahunnya sebesar Rp. 195.245.750.685,33, kemudian disusul oleh realisasi penerimaan pajak restoran dengan total penerimaan sebesar Rp. 68.882.156.522,00, selanjutnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan total nominal sebesar

Rp. 40.764.627.392,60, di sini terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan jauh mengungguli penerimaan pajak restoran dan pajak hotel serta penerimaan pajak-pajak daerah lainnya. Untuk realisasi penerimaan pajak daerah yang terkecil jumlah penerimaannya adalah pajak pengolahan bahan galian golongan C dengan total realisasi penerimaan selama lima tahunnya adalah sebesar Rp. 3.304.623.916,00.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang adalah penerimaan pajak yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama kurun waktu lima tahun adalah sebesar Rp. 39.049.150.137,06.

Tabel 1.3
Kontribusi 7 Jenis Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode Tahun 2006-2010
(Persen)

Pajak Daerah	Tahun					Total Kontribusi
	2006	2007	2008	2009	2010	
Pajak Hotel	10,06	9,62	9,84	12,22	13,54	55,28
Pajak Restoran	19,29	20,90	20,24	19,00	18,48	90,91
Pajak Hiburan	3,98	5,01	5,40	5,15	4,91	24,45
Pajak Reklame	8,05	8,00	5,96	4,99	4,42	31,42
Pajak Penerangan Jalan	55,14	52,23	54,74	55,76	55,78	273,65
Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C	1,12	0.14	1,33	0,63	0,57	3,79
Pajak Parkir	2,33	2,71	2,47	2,23	2,28	12,02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang (Data diolah)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang terhadap pajak daerah adalah yang tertinggi dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya. Persentase kontribusi Pajak Penerangan Jalan selama periode lima tahun nilai persentasenya selalu diatas 50%, ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang produktif dan potensial.

Dari data yang terlihat pada pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahunnya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2007 terdapat penurunan persentase penerimaan, tetapi secara nominalnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang untuk tahun 2006, kontribusinya terhadap pajak daerah adalah sebesar 55,14%, kemudian pada tahun 2007 terjadi penurunan persentase sebesar 2,91% menjadi 52,23%, tetapi secara nominal penerimaan Pajak Penerangan Jalan meningkat. Pada tahun 2008 kembali meningkat sebesar 2,51% menjadi 54,74%, kemudian pada tahun 2009 kembali meningkat sebesar 1,02% menjadi 55,76%, selanjutnya pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 0,02% menjadi 55,78% sehingga total kontribusi selama periode lima tahun adalah sebesar 273,65% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya adalah 54,73%.

Penerimaan pajak daerah terbesar kedua adalah pajak restoran dengan total kontribusi selama periode lima tahun adalah 90,91% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya adalah sebesar 18,18%. Penerimaan pajak daerah terbesar ketiga adalah pajak hotel dengan total kontribusi sebesar 55,28% dan rata-ratanya adalah 11,05%, kemudian pajak daerah terbesar keempat adalah pajak reklame dengan total kontribusi penerimaan adalah sebesar 31,42% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya 6,2%, selanjutnya penerimaan dari pajak hiburan dengan total penerimaan sebesar 24,25% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya adalah 4,85%, kemudian penerimaan dari pajak parkir dengan total penerimaan sebesar 12,02% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya adalah 2,40%, selanjutnya yang terakhir penerimaan pajak daerah dari pajak pengolahan bahan galian golongan C dengan total penerimaan sebesar 3,79% dengan

rata-rata penerimaan penerimaan per tahunnya sebesar 0,75% dari keseluruhan pajak daerah.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.3, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang penerimaannya paling produktif dan potensial, karena pajak penerangan jalan merupakan pajak yang menyumbangkan kontribusi yang paling besar dari keseluruhan pajak daerah yang ada.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Periode Tahun 2006-2010

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (Persen)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persen)
2006	22.500.000.000,00	24.844.879.752,00	55,14	25,56
2007	28.000.000.000,00	26.896.727.353,33	52,23	18,92
2008	40.000.000.000,00	37.972.161.830,00	54,74	22,15
2009	53.895.932.360,00	47.226.315.254,00	55,76	27,70
2010	53.400.000.000,00	58.305.666.496,00	55,78	22.85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2007, 2008 dan 2009 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang tidak melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sementara pada tahun 2006 dan 2010 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah di Kota Palembang sangat besar nilainya, ini dapat dilihat bahwa kontribusinya selalu diatas 50% dengan rata-rata penerimaan tiap

tahunnya selama kurun waktu lima tahun adalah sebesar 54,73%, ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan sangat produktif.

Dari data yang tersaji pada tabel 1.4 menunjukkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar nilainya, kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2009 dengan menyumbangkan 27,70% dan terendah pada tahun 2007 dengan menyumbangkan 18,92% dari nilai PAD. Selama kurun waktu lima tahun total penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD adalah sebesar 117,18% dengan rata-rata penerimaan per tahunnya adalah sebesar 23,43% dari nilai keseluruhan PAD.

Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Di Kota Palembang, salah satu jenis pajak yang potensial untuk menambah pemasukan dana pembangunan adalah Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2010 sampai dengan bulan Desember realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang sebesar Rp. 58.035.666.496,00 jauh mengungguli sektor pajak daerah lain seperti penerimaan pajak restoran yang hanya mencapai Rp. 19.226.002.354,00. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang sangat potensial untuk dikembangkan serta peningkatan jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan optimalisasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang sehingga sektor ini memiliki prospek yang cukup bagus bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang khususnya dilakukan Dispenda Kota Palembang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka

penelitian ini mengambil judul: **"ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA PALEMBANG.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kota Palembang.
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas dari Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Palembang.
2. Menganalisis tingkat efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh informasi lebih mengenai Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Kota Palembang. Dengan adanya penelitian ini juga

diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini mengetahui potensi riil penerimaan dan tingkat efektifitas dari Pajak Penerangan Jalan. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Operasional

Manfaat ini diperuntukkan bagi pihak-pihak/pembuat kebijakkan yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Penerangan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statitik Kota Palembang. 2007. *Kota Palembang Dalam Angka.* Palembang.

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan. *Propinsi Sumatera Selatan Dalam Angka.* Palembang.

Bantara, Febi. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Balik Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Skripsi,* Universitas Sriwijaya, Inderalaya (tidak dipublikasi).

Davey, Kenneth J.,1983, *Financing Regional Government*, John Wiley and Sons, New York, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. 2010. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2006-2010.* Palembang: Dispenda

Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Fieldman. N. J, 1949, *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.

Hartantri, Rizki. 2006. Analisis Potensi Pemakaian Kekayaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. *Skripsi,* Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi).

Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFE.

Mangkoesobroto, Guritno.1997. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta: UGM.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Munawir,H. S. 1997. *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Musgrave, Richard. A. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, diterjemahkan: Alfonsius Sirait.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

PT. PLN Pesero W.S2JB. 2006. Cabang Palembang. Laporan Ikhtisar Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2006. Palembang: PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang.

PT. PLN Pesero W.S2JB. 2007. Cabang Palembang. Laporan Ikhtisar Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2007. Palembang: PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang.

PT. PLN Pesero W.S2JB. 2008. Cabang Palembang. Laporan Ikhtisar Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2008. Palembang: PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang.

PT. PLN Pesero W.S2JB. 2009. Cabang Palembang. Laporan Ikhtisar Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2009. Palembang: PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang.

PT. PLN Pesero W.S2JB. 2010. Cabang Palembang. Laporan Ikhtisar Penjualan Tenaga Listrik Tahun 2010. Palembang: PT. PLN Persero W.S2JB Cabang Palembang.

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*"

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*"

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*"

Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasi)

Saddat, Anwar.A. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya (tidak dipublikasi).

Siahaan. M.P. 2005. Edisi 1. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak. 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN

Soedargo. 1992. *Retribusi dan Perpajakan Daerah,* Jakarta: Sinar Grafika.

Suandy, Erly.2006. *Perpajakan Edisi 2.* Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2006. *Hukum Pajak Edisi 3.* Jakarta : Salemba Empat.

Suparmoko. 2002. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Penerbit BPFE.